

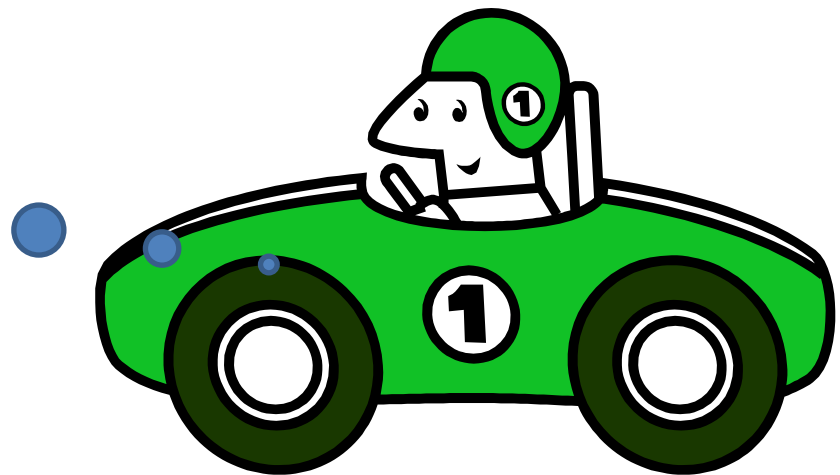
Pendidikan Kewarganegaraan

DEMOKRASI INDONESIA

raharjoppkn@staff.uns.ac.id

<https://civitas.uns.ac.id/raharjoppkn/>

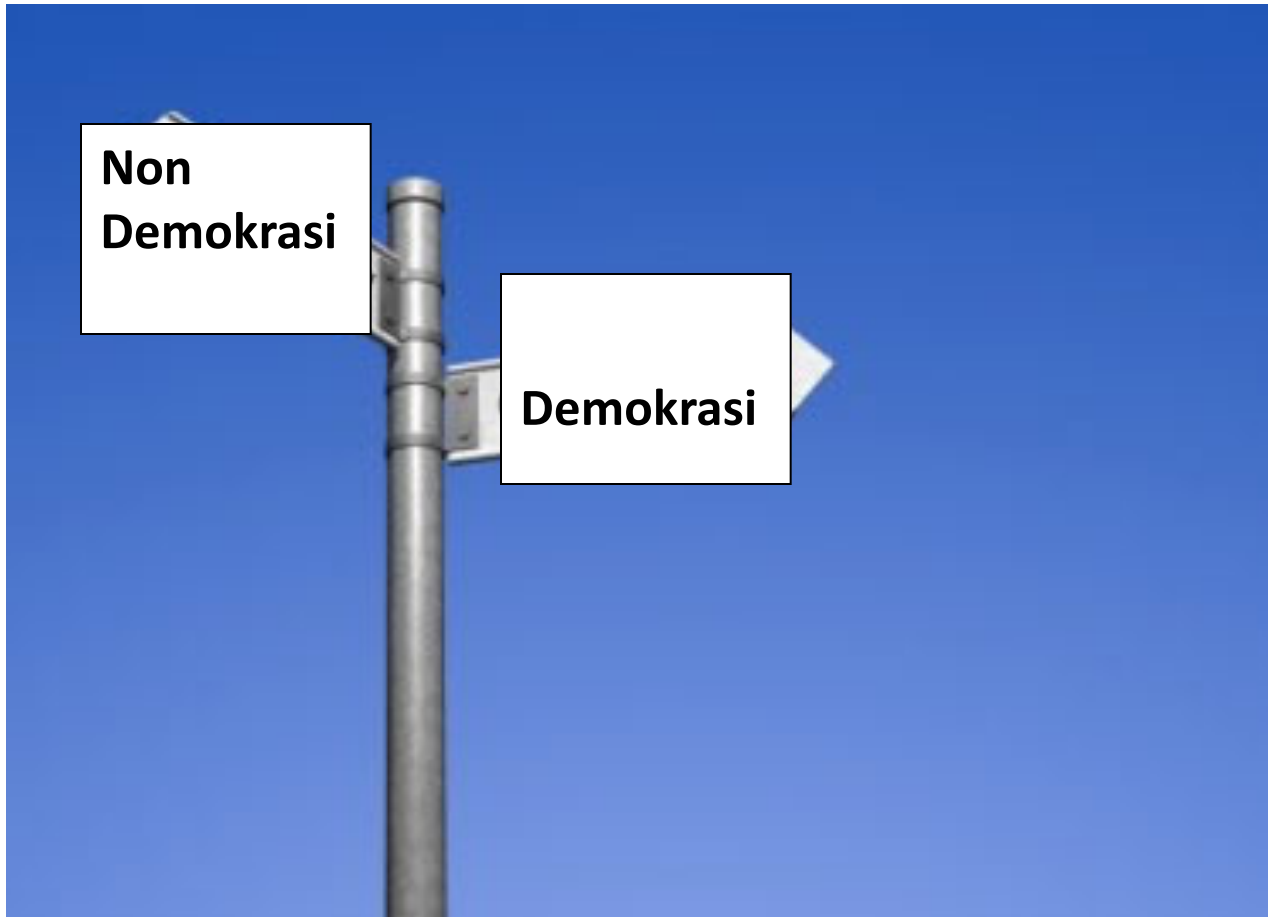
ADA BANYAK JALAN MENUJU DEMOKRASI



Lewat mana ?



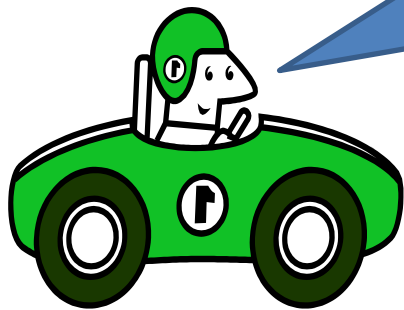
Jalan menuju kesejahteraan



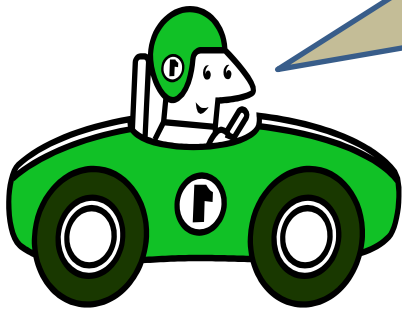
Yang benar

An illustration featuring two stylized businessmen in black suits and red ties, running through a series of interlocking gears. The gears are rendered in shades of blue, green, and grey. The background is a light blue gradient. The overall theme suggests a fast-paced, competitive environment.

**DEMOKRASI HANYALAH
SALAH SATU JALAN
MENUJU KESEJAHTERAAN
DALAM HIDUP BERNEGARA**

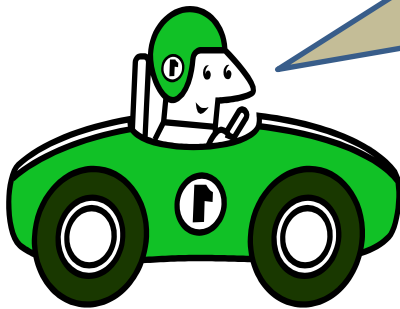


Jadi banyak jalan menuju
kesejahteraan : otoriter,
diktator, rezim militer, monarki
absolut, totaliter , dll
Tapi mengapa harus melalui
demokrasi ?

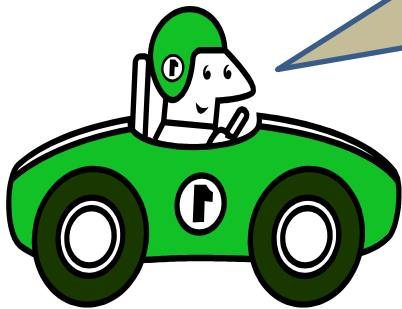


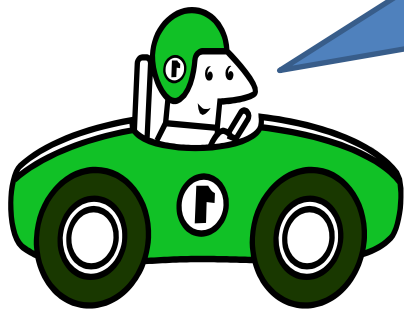
Karena demokrasi mengakui
adanya prinsip : **kebebasan,**
persamaan dan kedaulatan
rakyat
Apa yang lain tidak?

**JADI PILIH MANA?
HIDUP DIBAWAH
MONARKI YANG BAIK
HATI ATAUKAH
DIBAWAH DEMOKRASI
?**



TAPI JIKA DEMOKRASI
TIDAK BISA DIKELOLA
DENGAN BAIK MAKA
BISA JATUH KE ANARKI





Tetapi supaya demokrasi tidak
“kebablasan” maka perlu
diatur dengan hukum
**Jadi demokrasi butuh negara
hukum (demokrasi dan
nomokrasi)**

Materi

DEMOKRASI INDONESIA

- Apa itu demokrasi dan demokratisasi?
- Apa sistem politik di Indonesia?
- Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
- Apa guna demokrasi dan mengapa perlu ada pendidikan demokrasi?

Konsep Demokrasi

- **Demokrasi sbg bentuk pemerintahan :**
pemerintahan rakyat (dari, oleh, untuk)
- **Demokrasi sbg sistem politik** (sebagai kebalikan dari sistem politik non demokrasi)
- **Demokrasi sbg sikap hidup :** sikap dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi sebagai kebalikan dari sikap anti demokrasi
- **Lalu apa nilai demokrasi itu?**

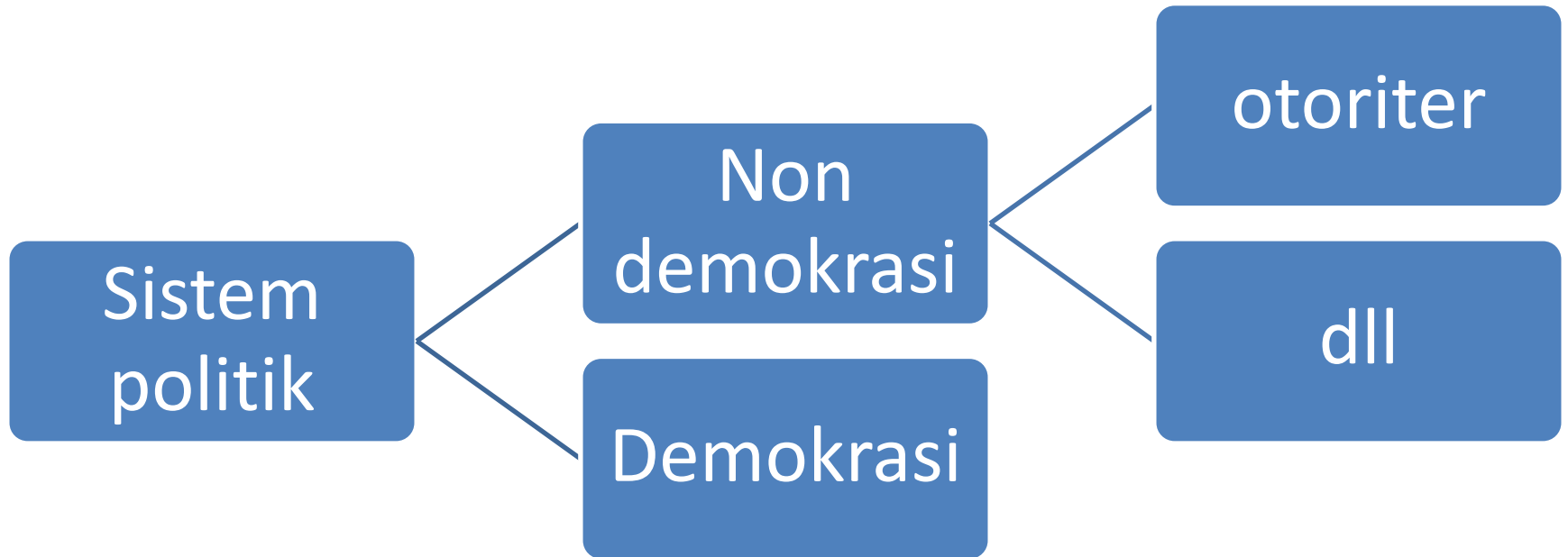
Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

- Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan
- Bentuk pemerintahan model klasik (Aristoteles, Plato, Polybius) : Monarki-*Tirani*- Aristokrasi- *Oligarki*- Demokrasi -*Mobokrasi*
- Didasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk siapa kepemimpinannya (kuantitas dan kualitas)
- Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
- Bentuk pemerintahan model modern (Machiavelli) : Republik - Kerajaan (Monarki)
- Didasarkan pada cara atau prosedur menjadi kepala negara /pemimpin negara
- Dengan munculnya klasifikasi bentuk pemerintahan baru/modern maka demokrasi sebagai bentuk pemerintahan mulai ditinggalkan

Demokrasi sebagai sistem politik

- Dewasa ini demokrasi dipahami tidak sekedar sebagai bentuk pemerintahan tetapi sebagai sistem politik
- Sistem politik lebih luas pengertiannya dari sistem pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu sistem politik
- Sistem politik secara garis besar dibedakan dua yaitu sistem politik demokrasi dan otoriter (Arief Budiman). Pembagian lain menjadi sistem politik *demokrasi* dan *non demokrasi* (Samuel Huntington, 2001)
- Termasuk sistem politik non demokrasi : otoritarian, totalitrian, rezim militer, monarki absolut, kediktatoran, rezim komunis, fasis, sistem satu partai
- Ukuran yang membedakan adalah dari ciri-ciri yang menandakan keduanya. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran/otoritarian adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian

Pembagian sistem Politik



SISTEM KENEGARAAN

- SISTEM POLITIK
- SISTEM
PEMERINTAHAN
- BENTUK
PEMERINTAHAN
- BENTUK NEGARA



Sistem politik demokrasi

- Sistem politik demokrasi berisi lembaga-lembaga yang berjalan menurut dan sesuai dengan prinsip dan prosedur demokrasi
- Sistem politik demokrasi menggunakan dan menjalankan prinsip/prosedur demokratis seperti ; *pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan mayoritas, pemerintahan dengan diskusi, pemilihan umum yang bebas, partai politik lebih dari satu, management yang terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak hak minoritas, perlindungan terhadap hak asasi manusia , peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara , penyelesaian secara damai, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, konstitusi yang demokratis, prinsip persetujuan*
- Negara yang bercirikan demikian dikatakan negara demokrasi dengan ukuran yang *kontinu*

Demokrasi sebagai sikap hidup

- Demokrasi sekarang ini bukan hanya dipandang sebagai sistem pemerintahan/politik tetapi sudah merupakan *sikap hidup* yaitu sikap hidup yang demokratis
- Negara demokrasi tidak akan tercapai bila hanya dengan membangun pemerintahan (sistem) yang demokratis. Negara demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang memiliki sikap hidup demokratis.
- Masyarakat demokratis terdiri dari warga negara –warga negara yang memiliki dan menjalankan budaya demokrasi.
- Sebagai sikap hidup maka budaya demokrasi berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya dimiliki dan dijalankan oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi.
- Apa itu nilai-nilai demokrasi?

Nilai –nilai demokrasi

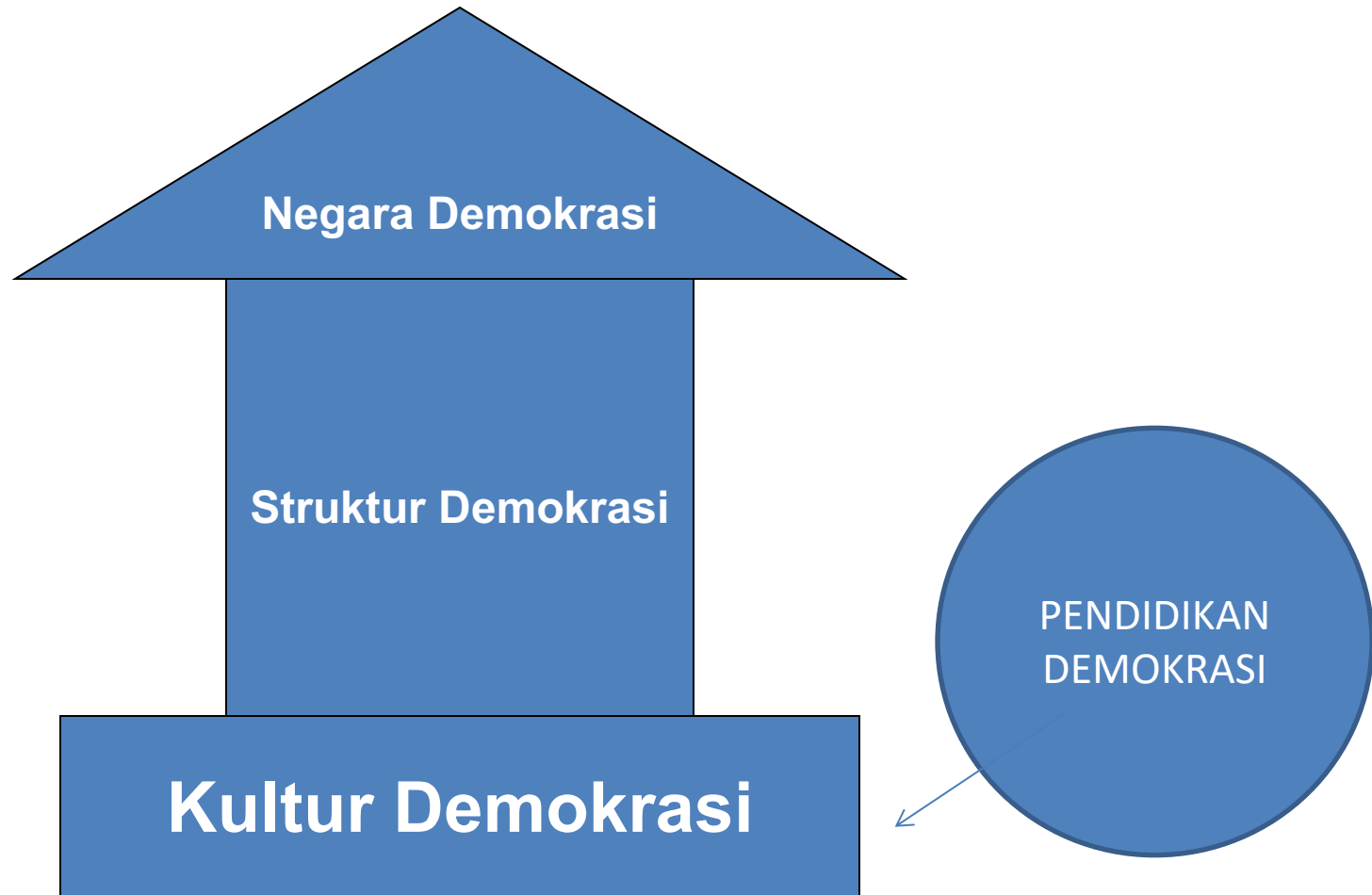
- *toleran; kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat; memahami keanekaragaman dalam masyarakat; terbuka dalam berkomunikasi; menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan; percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain; saling menghargai; mampu mengekang diri; kebersamaan; keseimbangan dan anti kekerasan.*

MENURUT PENDAPAT ANDA
BAGAIMANAKAH DOSEN YANG DEMOKRATIS
ITU?

BAGAIMANAKAH ORTU YANG DEMOKRATIS
ITU?

BAGAIMANAKAH KELAS / PERUSAHAAN /
ORGANISASI / YANG DEMOKRATIS ITU?

Rumah Demokrasi



Struktur demokrasi ?

- Yakni lembaga dan pranata yang diperlukan di negara demokrasi
- Misal badan perwakilan, pemilu, partai politik, media massa, lsm
- Lembaga lembaga tersebut dibuat/ dibentuk oleh masyarakat dan negara
- Misal masyarakat mendirikan partai politik, ormas, dan seterusnya

Kultur demokrasi

- Adalah budaya yakni sikap dan perilaku warga yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi
- Apa contohnya? Melakukan musyawarah, apa lagi?
- Dia akan mendukung/menopang berjalannya lembaga demokrasi
- Sebaliknya lembaga demokrasi akan menjamin berjalannya budaya demokrasi

Kultur demokrasi

- BAGAIMANA JIKA MASYARAKAT SUATU WILAYAH BELUM BERBUDAYA DEMOKRASI ?
- DIA BLM BISA MENDUKUNG LKEMBAGA DEMOKRASI
- MAKA PERLU **PENDIDIKAN DEMOKRASI**
- **BAGAIMANA JIKA SUATU WILAYAH BLM ADA LEMBAGA DEMOKRASI ?**
- **DIBUATLAH LEMBAGA DEMOKRASI**
- **MEMBANGUN KULTUR LEBIH LAMA DAN BERAT, MEMBANGUN KULTUR DENGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI**
- **PENDIDIKAN DEMOKRASI PERLU WAKTU DARIPADA MEMBUAT LEMBAGA DEMOKRASI**

DEMOKRASI DI INDONESIA

- Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana di tingkat lokal (desa) dan bukan dalam tingkat kenegaraan Indonesia masa lalu, di tingkat bawah demokrasi, tetapi di tingkat atas feodalisme (Moh. Hatta)
- Demokrasi Indonesia masa lalu disebutnya sebagai demokrasi asli /desa, misalnya pemilihan kepala desa dan rembug desa.
- Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau anasir yaitu;
 - ✓ rapat
 - ✓ mufakat
 - ✓ gotong royong
 - ✓ hak mengadakan protes bersama
 - ✓ hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut

DEMOKRASI DI INDONESIA

- Demokrasi asli / desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern
- Demokrasi Indonesia modern menurut Moh Hatta harus meliputi 3 hal yaitu;
 - ✓ demokrasi di bidang politik
 - ✓ demokrasi di bidang ekonomi
 - ✓ demokrasi di bidang sosial
- Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial

DEMOKRASI DI INDONESIA

- Negara Indonesia adalah negara demokrasi . Para pendiri negara mencitakan bahwa Indonesia merdeka haruslah negara yang berkedaulatan rakyat. Cita-cita demokrasi itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV
- Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila
- Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mencakup demokrasi di bidang politik, ekonomi dan sosial
- Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai perihal pengambilan keputusan
- Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia

DEMOKRASI DI INDONESIA

- Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdiri atas: periode masa revolusi kemerdekaan, masa demokrasi parlementer (*representative democracy*), masa demokrasi terpimpin (*guided democracy*), pemerintahan Orde Baru (*Pancasila democracy*), dan selanjutnya demokrasi di masa reformasi
- Sendi –sendi pokok daripada sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut; Ide kedaulatan rakyat, Negara berdasar atas hukum, Bentuk republik , Pemerintahan berdasar konstitusi , Pemerintahan yang bertanggungjawab, Sistem perwakilan, Sistem pemerintahan presidensial
- Tantangan demokrasi Indonesia masa depan tergantung apakah kultur masyarakat termasuk pemimpin mendukung penuh tradisi dan nilai nilai demokrasi (kultur) sebagai syarat bagi berjalannya lembaga politik (struktur) demokrasi.

Negara Hukum dan HAM

[Http://civitas.uns.ac.id/raharjoppkn/](http://civitas.uns.ac.id/raharjoppkn/)

UU Ormas Bertentangan dengan Prinsip Pokok Negara Hukum

Redaktur: Syaripudin

Selasa, 20 Maret 2018

- **INDOPOS.CO.ID** - Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Indra Perwira menegaskan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) tanpa proses peradilan seperti diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Pengesahan Ormas bertentangan dengan prinsip pokok negara hukum.
- Itu dia utarakan saat menjadi saksi ahli dalam lanjutan sidang uji materi Undang-Undang Ormas di Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/3). Padahal, jelas Indra juga, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan 6-13-20/PPU-VII/2010 menyatakan, dalam suatu negara hukum seperti Indonesia mutlak adanya due process of the law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan.
- Karena itu, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan.

Negara Hukum dan HAM

- Apa negara hukum dan mengapa negara harus negara hukum?
- Apa prinsip negara hukum ?
- Apakah Indonesia negara hukum dan bagaimana perumusannya?
- Apa itu HAM dan apa hubungan negara hukum dengan HAM?
- Bagaimana perumusan HAM di Indonesia?
- Manfaat apa yg diperoleh dari pengetahuan tentang negara hukum dan HAM?

Negara hukum

- Bermula dari negara Kekuasaan
- Homo Homini Lupus : mn adalah serigala bagi yang lain
- Mn itu pada dasarnya adalah buruk dan cenderung berkuaasa (T Hobbes)
- Kekuasaan harus dibatasi oleh **hukum**
- **Muncullah negara hukum**

Negara Hukum (Rechtsstaat/ Rule of Law)



- Negara politik
- Negara ekonomi
- Negara moral
- Negara ?

Negara hukum formal

- Menjaga ketertiban dan keamanan
- Bersifat pasif terhadap upaya mensejahterakan warganya
- Muncul pada abad -19
- Namun banyak kelemahannya. Apakah itu?

Negara hukum material

- Menjaga tertib dan keamanan warga
- Bertindak aktif mengupayakan kesejahteraan warganya
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menyejahterakan warganya

Negara Hukum

- Merupakan *perumusan yuridis* dari *gagasan konstitusionalisme*. Negara hukum dan konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak terpisahkan
- Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat (hukum Eropa Kontinental) atau Rule of Law (hukum Anglosaxon)
- Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Segala tindakan harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- Di negara hukum, hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum.
- Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Hukum yang dijalankan harus memenuhi tiga ide dasar hukum; kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
- Di negara hukum, hukum negara berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi

Negara Hukum Formal

- Dalam sejarah perkembangannya negara hukum ada dua yaitu *negara hukum formal* dan *negara hukum material*
- Negara hukum formal berkembang pada abad -19 yang bercirikan sifat pemerintahan pasif
- Negara pasif artinya bertindak bilamana hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban keamanan terancam
- Negara dan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan ekonomi sosial budaya dan kesejahteraan rakyat. (*The least government is the best government*)
- Kepentingan rakyat untuk makmur dan sejahtera diserahkan pada rakyat sendiri. Rakyat dibiarkan mengurus kebutuhannya sendiri (paham liberalisme)
- Negara hukum formal dikatakan sebagai negara penjaga malam. Disebut pula negara hukum dalam arti sempit

Negara Hukum Material

- Muncul pada abad -20
- Gagasan bahwa pemerintah tidak perlu turut campur dalam hal kesejahteraan rakyat lama kelamaan ditentang karena menciptakan kesenjangan kesejahteraan
- Negara dan pemerintah perlu turut campur (aktif) mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai kebijakan
- Ide baru ini memunculkan istilah Welfare State (negara kesejahteraan). Perumusan yuridis yang muncul adalah negara hukum material
- Dalam negara hukum material , pemerintah berwenang turut campur akan pemenuhan kebutuhan warga dan membangun kesejahteraan warganya.
- Pemerintah bersifat aktif, memiliki keleluasaan yang besar dalam urusan publik warga negara
- Negara hukum material dikenal pula sebagai negara hukum dalam arti luas

Ciri Negara Hukum

- Ciri-ciri dari Rechtsstaat
 - ✓ Pengakuan HAM
 - ✓ Pemisahan atau pembagian kekuasaan
 - ✓ Pemerintahan berdasarkan aturan
 - ✓ Peradilan administrasi
- Ciri-ciri dari Rule of Law
 - ✓ Supremasi hukum
 - ✓ Kedudukan yang sama di depan hukum
 - ✓ Jaminan HAM
- Ciri-ciri demikian masih dipengaruhi konsep negara hukum formal
- Banyak pendapat yang mengemukakan tentang ciri-ciri dari negara hukum

Negara Hukum Indonesia

- Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Sebelumnya terdapat dalam bagian penjelasan UUD 1945
- Perumusan negara hukum Indonesia adalah ; negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka dan pemerintah negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas , tidak absolut.
- Konsepsi negara hukum Indonesia termasuk konsep negara hukum materiel atau negara hukum dalam arti luas
- Hal ini tampak dalam hal 4 tugas pokok negara dan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945
- Dalam hal penyelenggaraan perekonomian negara dan kesejahteraan sosial , negara terlibat aktif (pasal 33 dan 34 UUD 1945)

Negara Hukum Indonesia

- Perwujudan negara hukum di Indonesia adalah diwujudkan sistem hukum nasional yang berpuncak pada konstitusi negara yaitu UUD 1945.
- Sistem hukum nasional berisi peraturan perundang-undangan yang hierarkis, yang meliputi
 - ✓ Undang-undang Dasar 1945
 - ✓ Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
 - ✓ Peraturan Pemerintah (PP)
 - ✓ Peraturan Presiden (Perpres)
 - ✓ Peraturan Daerah (Perda)
- Selain perundangan (hukum), dibentuk lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu MA dengan lembaga peradilan di bawahnya dan MK

Negara Hukum dan HAM

- Negara yang berdasar hukum memiliki jaminan akan HAM. Jaminan atau pengakuan akan HAM merupakan ciri negara hukum
- HAM bukan diberikan oleh negara tetapi negara memberi pengakuan akan hak itu sebagai kodrat manusia
- Negara yang tidak menjamin HAM bukan negara hukum dalam arti sesungguhnya
- Jaminan akan HAM tersebut dituangkan dalam konstitusi negara.

HAM: Teddy Prihatin Banyak Pelanggaran HAM Di Lingkungan Pendidikan

Selasa, 3 April 2018 21:02

- Sekda Bangka Teddy Sudarsono menilai saat ini banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di lingkungan pendidikan karena kurangnya wawasan pendidikan [HAM](#) yang ditanam sejak dini termasuk di dunia pendidikan.
- Pelanggaran [HAM](#) banyak dilakukan oleh siswa sekolah yang korbannya siswa lain, begitu juga sebaliknya guru yang menjadi korban pelanggaran [HAM](#). Dengan demikian pendidikan [HAM](#) bagi guru menjadi sama penting dengan pendidikan [HAM](#) bagi siswa.
- Oleh karena itu perlunya pendidikan [HAM](#) sejak dini bertujuan memberikan pengertian dan wawasan kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya memahami hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap hak asasi manusia.
- Pendidikan [HAM](#) diberikan secara baik dan benar agar kehidupan manusia berkualitas ditengah euforia kebebasan menyikapi penerapan [HAM](#).



Hakekat HAM

- Merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
- Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.
- Landasan HAM pertama dan langsung : yakni kodrat manusia. Yaitu bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Landasan kedua bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.
- Contoh hak dasar; hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik
- Setelah manusia bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara

Sejarah perkembangan HAM

- Sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya, sebagai akibat tindakan kesewenang-wenangan dari tirani penjajahan, perbudakan, dan ketidakadilan
- Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam meliputi HAM dalam sejarah masa lalu dan sejarah modern
- Sejarah perjuangan HAM masa lalu , contoh; Perjuangan nabi Musa (6000 SM), Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM), dan Perjuangan nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraiys (600 M)
- Sejarah HAM modern, contoh; Magna Charta (1215), Revolusi AS (1776), Revolusi Perancis (1789), Atlantic Charter (1941), DUHAM (10 Desember 1948 oleh PBB)

Sejarah Perkembangan HAM

- Berdasar sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu *Pertama* adalah Hak Sipil dan Politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), *Kedua* adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis di Eropa Timur, *Ketiga* adalah Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara berkembang
- Perkembangan berikutnya yaitu munculnya **generasi keempat** hak asasi manusia (Tim ICCE UIN, 2003). Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.
- Sejak dideklarasikan DUHAM (1948) oleh PBB yang diikuti konvensi HAM internasional lainnya maka HAM menjadi isu global, selain isu demokrasi dan lingkungan hidup.

HAM di Indonesia

- Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan DUHAM PBB 10 Desember 1948
- Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebagai berikut; Pembukaan UUD 1945 antara lain: I dan IV, Pasal 28 A-J, Tap MPR No XVII/ MPR/1998 , dan UU No 39 / 1999
- HAM yang ada dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut adalah : Hak untuk hidup, Hak Untuk Berkeluarga, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman , Hak atas Kesejahteraan, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak Wanita, Hak Anak
- Dengan masuknya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara adalah mengadakan penegakkan hak asasi manusia dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran HAM

Penegakan HAM

- Jaminan perlindungan terhadap HAM disamping dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk kelembagaan yang berkaitan dengan penegakan HAM
- Perangkat hukum dan lembaga tersebut antara lain: Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; KomNas HAM dibentuk berdasar KepPres Nomor 5 tahun 1993 jo UU no 39 tahun 1999; Pengadilan Hak Asasi manusia ; Pengadilan Hak Asasi manusia Ad Hoc dan KKR
- Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka penegakan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang HAM
- Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ; KONTRAS ; YLBHI ; ELSAM

Penegakan HAM

- Penegakan HAM juga berlaku bagi pelanggaran HAM internasional yaitu suatu kejahatan internasional
- Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana yang dianggap merugikan bagi seluruh masyarakat internasional, di mana setiap lembaga peradilan di tiap negara, bahkan peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi untuk mengadili
- Termasuk dalam jenis kejahatan ini, antara lain; kejahatan genocide; kejahatan terhadap kemanusiaan ; kejahatan melakukan agresi / perang dan ; pembajakan atau perompakan
- Masyarakat internasional memiliki hak dan kewenangan mencegah manakala terjadi pelanggaran HAM meskipun pelanggaran itu terjadi di dalam wilayah suatu negara.
- Terhadap kasus HAM internasional diberikan dua pilihan yaitu negara mengadili kasus tersebut secara tuntas dan adil atau dibentuk pengadilan internasional apabila negara ybs tidak mampu mengadili kasus tersebut

Hak asasi dan kewajiban dasar

- Pasal 28 J (2)
- Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

WAWASAN NUSANTARA

Apa yang dapat anda nyatakan dari gambar ini?
Sejak kapan kita memiliki wilayah spt ini?



Laut teritorial Indonesia kini

Apa keuntungan kita memiliki wilayah spt ini ?
Apa potensi ancamannya ?
Sekarang ini disebut negara Maritim ?

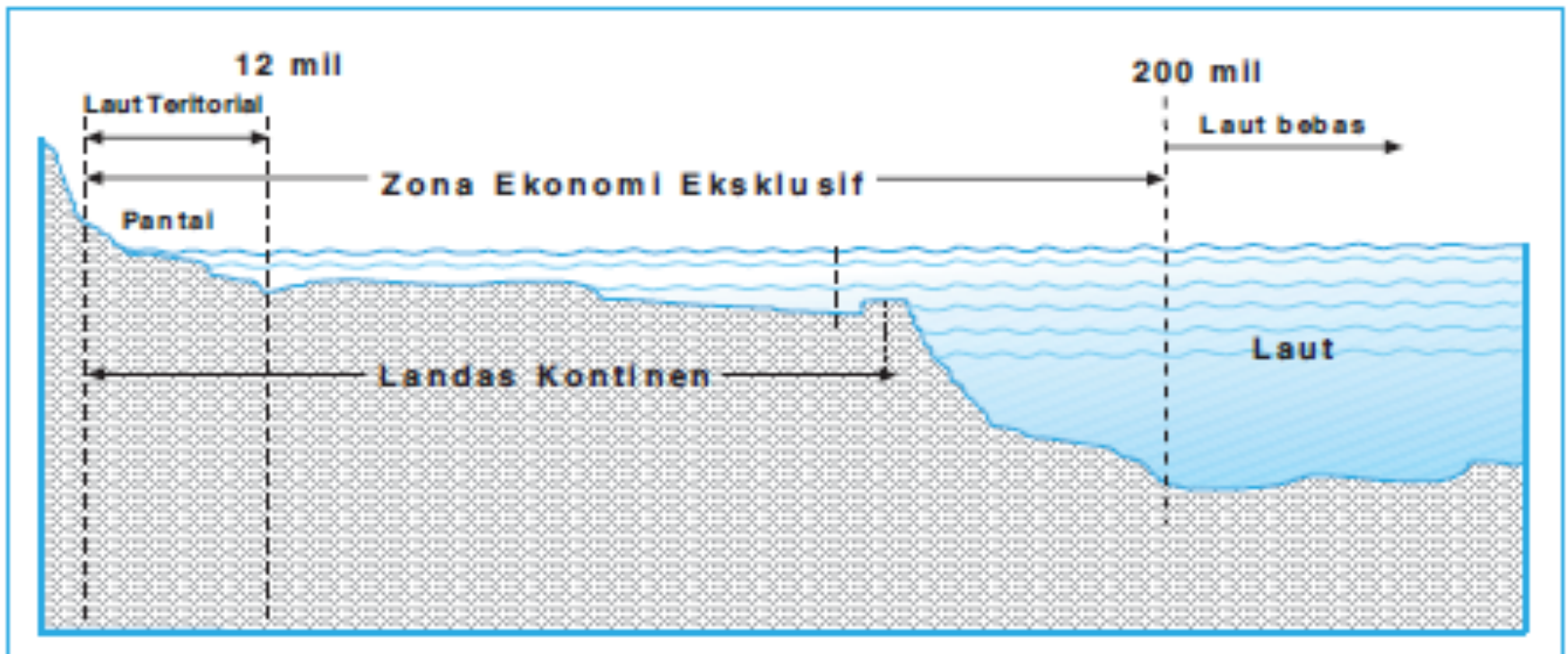
Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939



Pulau? Ada berapa?



Batas wilayah : darat, laut, udara?



Ir. Soekarno

- *“Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut **geopolitik**, maka Indonesialah Tanah air kita . Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap keperluan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah air kita!” (1 Juni 1945)*

WAWASAN NUSANTARA

- Apakah arti, hakekat dan kedudukan dari wawasan nusantara (wanus) bagi bangsa Indonesia?
- Mengapa muncul (latar belakang) konsep wawasan nusantara
- Apa unsur dasar dan perwujudan wanus?
- Apa tujuan dan manfaat dari adanya konsep wawasan nusantara?
- Apa hubungan antara wanus dengan otonomi daerah di Indonesia?

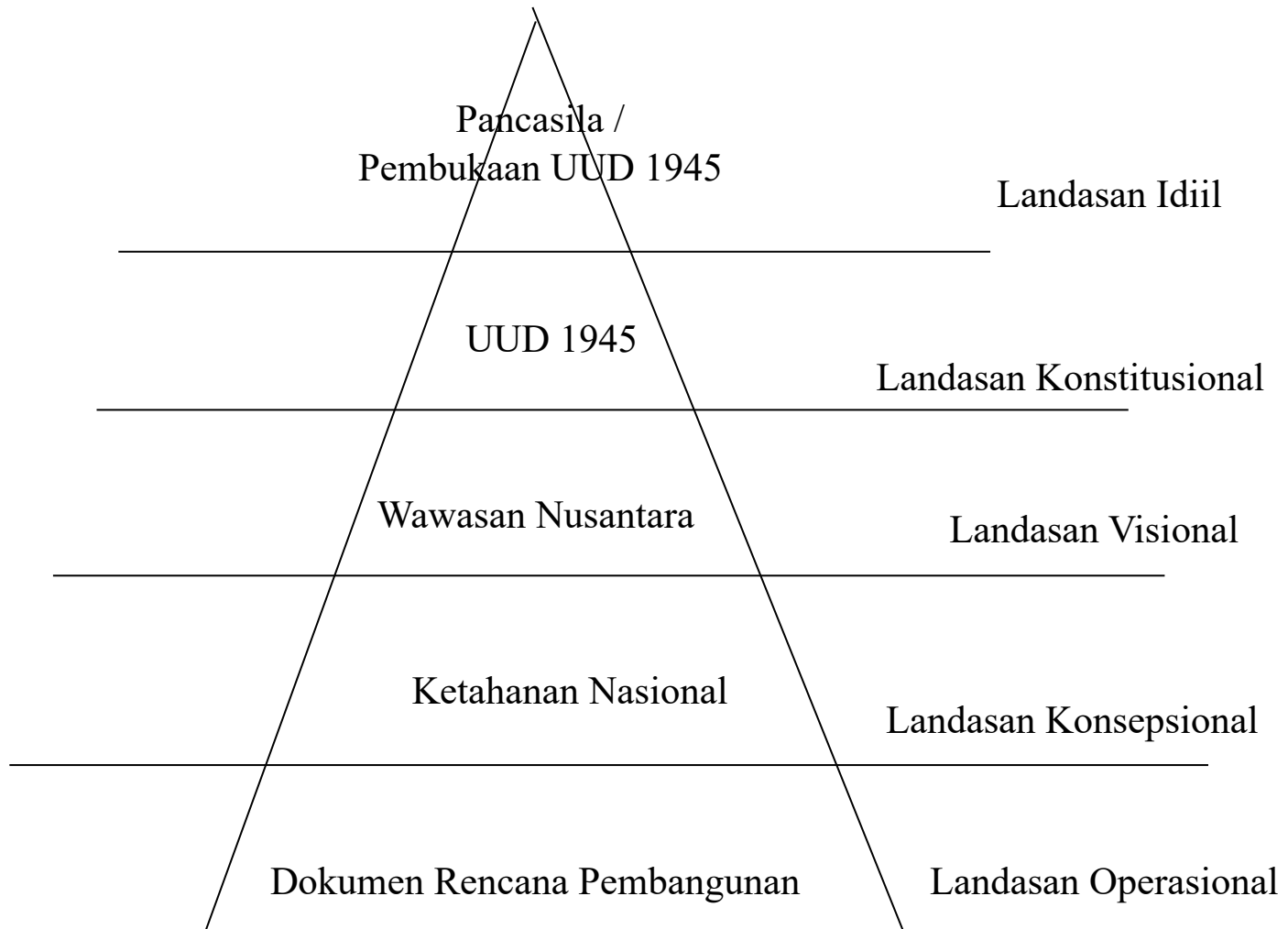
Pengertian

- Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) nya bangsa Indonesia, sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan.
- Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara 2 benua dan 2 samudera
- Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya (lingkungan) sebagai negara bangsa dengan semua aspek kehidupan yang beragam
- Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya

Hakekat dan kedudukan

- Pengertian dimaksud belum menjawab apa itu Wawasan Nusantara dalam hakekatnya
- Kita memandang diri bangsa Indonesia beserta nusantara sebagai lingkungannya itu sebagai apa? Jawaban akan hal itu adalah *hakekat* dari Wawasan Nusantara.
- Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara-nya merupakan satu kesatuan. Jadi hakekat Wawasan Nusantara adalah *keutuhan bangsa & kesatuan wilayah nasional*.
- Dengan kata lain hakekat Wawasan Nusantara adalah “ persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”
- Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai *visi bangsa* dalam paradigma nasional. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

Paradigma nasional



Latar belakang Wanus

- Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi Wanus.
- Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara adalah ;
 - Aspek historis atau sejarah
 - Aspek geografis dan sosial budaya
 - Aspek geopolitis dan kepentingan nasional
- Dari *segi sejarah*, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena dua hal, yaitu ;
 - Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah
 - Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah.

Latar belakang Wanus

- Penjajah menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah belah penjajah terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan politik "*Devide et impera*".
- Wilayah Indonesia adalah wilayah *eks* Hindia Belanda yang tidak merupakan satu kesatuan karena laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil, berdasarkan Ordonansi 1939.
- Untuk keluar dari keadaan terjajah membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Perjuangan bangsa Indonesia yang akhirnya bertitik puncak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945
- Upaya menjadikan wilayah sebagai satu kesatuan adalah mengganti Ordonansi 1939 dengan Deklarasi Juanda 1957.
- Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 melahirkan konsepsi wawasan nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan.

Isi Deklarasi Juanda

- *"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang"*
- Undang-undang tsb adalah UU No No 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah diperbahruai dengan UU No No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Deklarasi Juanda diperjuangkan dalam forum internasional. Berdasarkan Kovensi Hukum Laut 1982 "The United Nation Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS) , Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan (Archipelago State).

HAKEKAT WANUS

- KITA MEMANDANG Indonesia ITU SBG :
- **SATU KESATUAN WILAYAH**
- **SATU KESATUAN BANGSA**

- **MENGAPA PERLU DEMIKIAN?**
- **ADA 3 ALASAN : SEJARAH, GEOGRAFIS, GEOPOLITIS**

Latar belakang Wanus

- Dari segi *geografis dan sosial budaya* Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa /etnik yang heterogen.
- Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang . Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar
- Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh.
- Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi Wawasan Nusantara. Berdasar aspek ini maka muncul konsepsi Wawasan nusantara

Latar belakang Wanus

- Berdasar *geopolitik* , wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samodra dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan kebangsaan yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara.
- Geopolitik sebagai Ilmu Bumi Politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara ybs.
- Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu
- Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (*lebensraum*). Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak *chauvisnisme* dan juga bukan *kosmopolitanisme*
- Penerapan geopolitik bgs Indonesia : Wawasan Nusantara

Latar belakang Wanus

- **Berdasar sejarahnya**, Kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas atau eks Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki "*Le desir d etre ensemble dan Karakter-gemeinschaft*" itulah yang harus kita satukan dan pertahankan
- Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara.
- Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh
- Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, **bersatu**, berdaulat, adil dan makmur
- Upaya untuk terus membina persatuan dan keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

Unsur dasar Wanus

- Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung/terdiri dari 3 (tiga) unsur dasar ialah : Wadah (*contour*), Isi (*content*) dan Tata laku (*conduct*).
- “Wadah”nya adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk dengananeka ragam budaya
- "Isi"-nya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
- “Tata laku” batiniah adalah sikap, jiwa dan semangat setiap warga negara untuk mendukung konsepsi Wanus. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi Wanus

Perwujudan Wanus

- Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wanus
- Hakekat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup : Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya & Hankam
- Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan POLEKSOSBUDHANKAM tersebut tercantum dalam GBHN
- Untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai ajaran itu. Interpretasi Wawasan Nusantara harus disertai catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam memerlukan harmoni antara pusat dan daerah
- Wilayah Indonesia yang berciri *nusantara* tertuang dalam pasal 25 A UUD 1945 Amandemen IV

Tujuan dan Manfaat Wanus

- Tujuan Wawasan nusantara terdiri atas dua yaitu:
- Tujuan kedalam adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional,
- Tujuan keluar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
- Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut; diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional; bertambahnya luas wilayah territorial Indonesia; bertambahnya luas wilayah sebagai ruang hidup; penerapan Wanus menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara dan Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

Persoalan yang muncul

- Penarikan garis batas dapat menimbulkan konflik dengan negara lain oleh karena negara akan saling klaim
- Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi
- Kerawanan - kerawanan di pulau-pulau luar Indonesia : *illegal fishing, occupation, transit kejahatan, dll*
- Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang yang dapat melemahkan pembangunan berwawasan nusantara

Otonomi Daerah

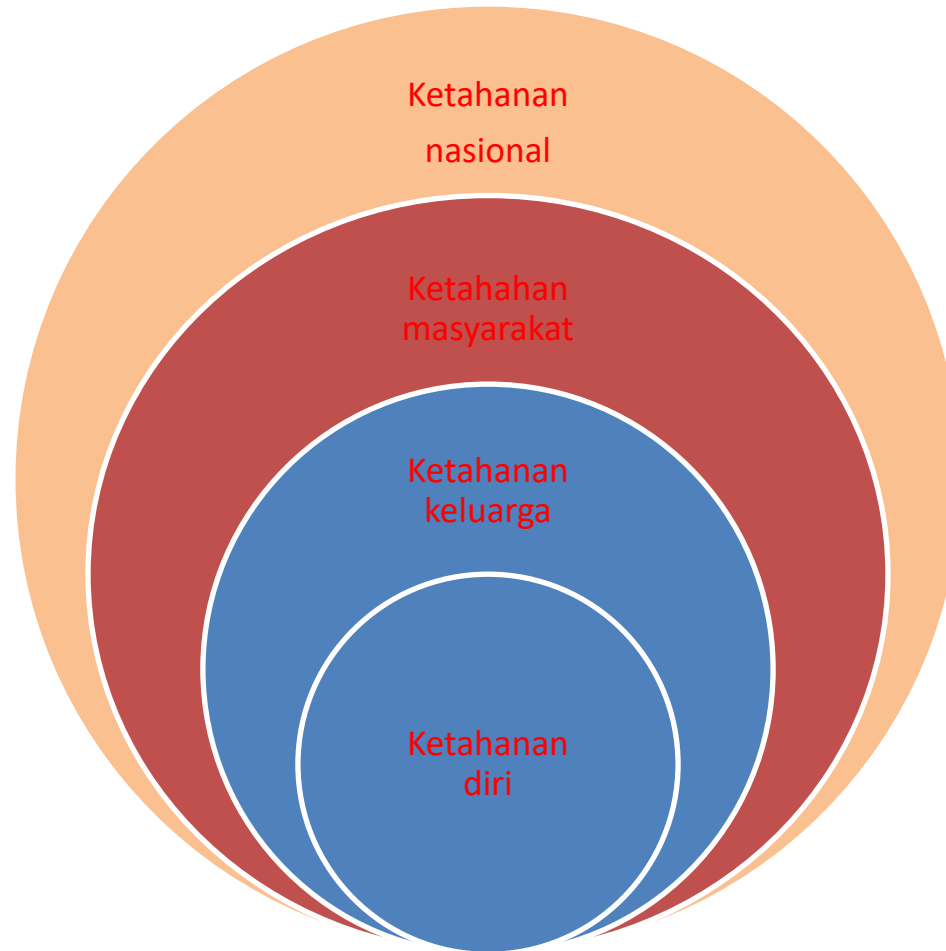
- Cara mengelola wilayah negara Indonesia sebagai ruang hidup untuk menjamin keadilan adalah dengan penerapan otonomi daerah
- Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem desentralisasi
- Daerah-daerah di Indonesia (prop, kab dan kota) diberi wewenang untuk mengelola sendiri daerahnya
- Di daerah tsb dibentuk pemerintahan daerah yang tetap merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia
- Otonomi daerah didasarkan pada pasal 18 UUD 1945 dan UU No 32 tahun 2004
- Otonomi daerah tidak bertentangan dengan konsep wawasan nusantara
- Otonomi daerah untuk keadilan. Keadilan prasarat dari kesatuan & persatuan bangsa sebagaimana visi dari Wanus

KETAHANAN NASIONAL

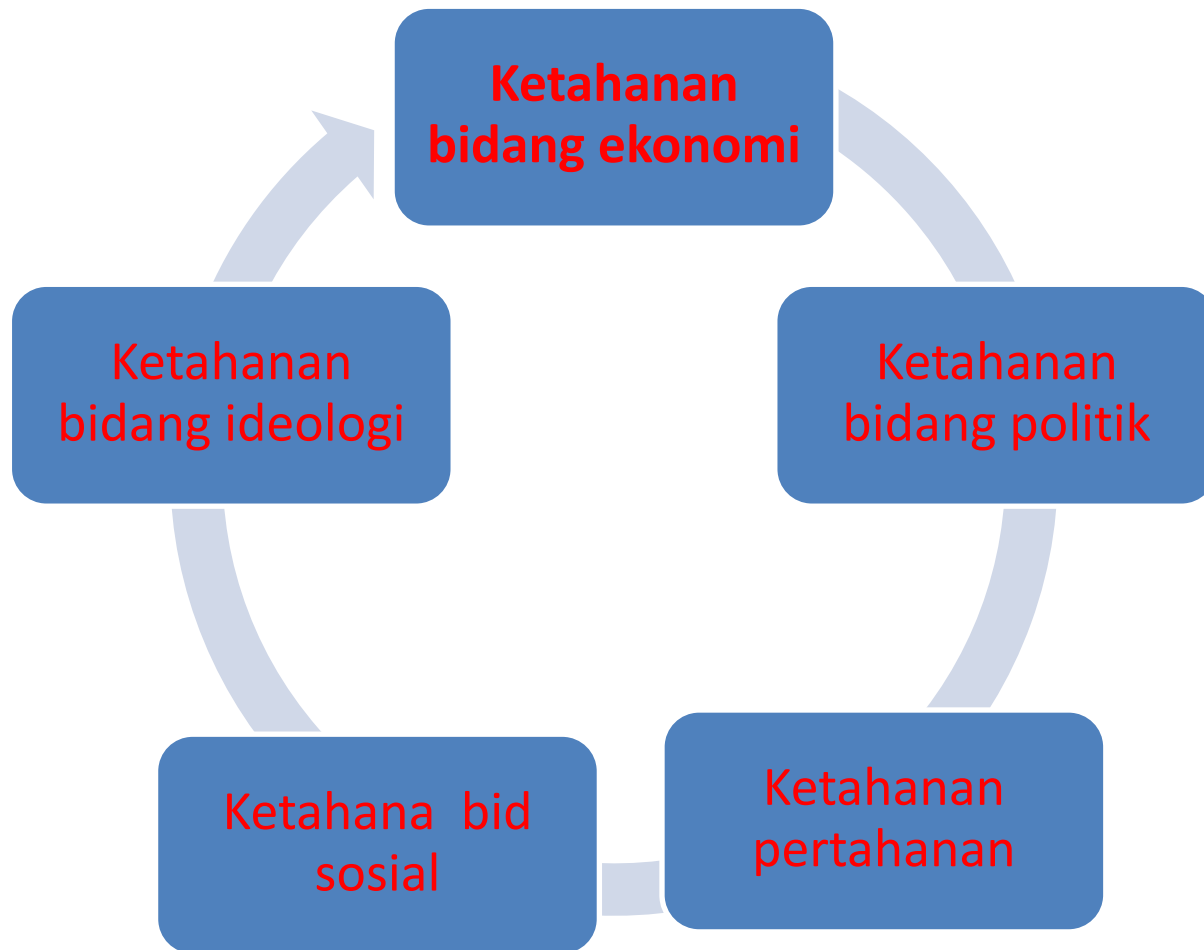
Ketahanan Diri

- Mengapa tubuh kita butuh ketahanan?
- Misal ketahanan ibu dan anak
- Bagaimana jika tidak ada ketahanan?
- Unsur –unsur apa yang menjadikan kita memiliki ketahanan tubuh?

Ketahanan berlapis



Bidang –bidang Tannas



Spektrum ketahanan

Ketahanan energi

- Dan seterusnya

Ketahanan pangan

- Dan seterusnya

Ketahanan mental

- Dan seterusnya

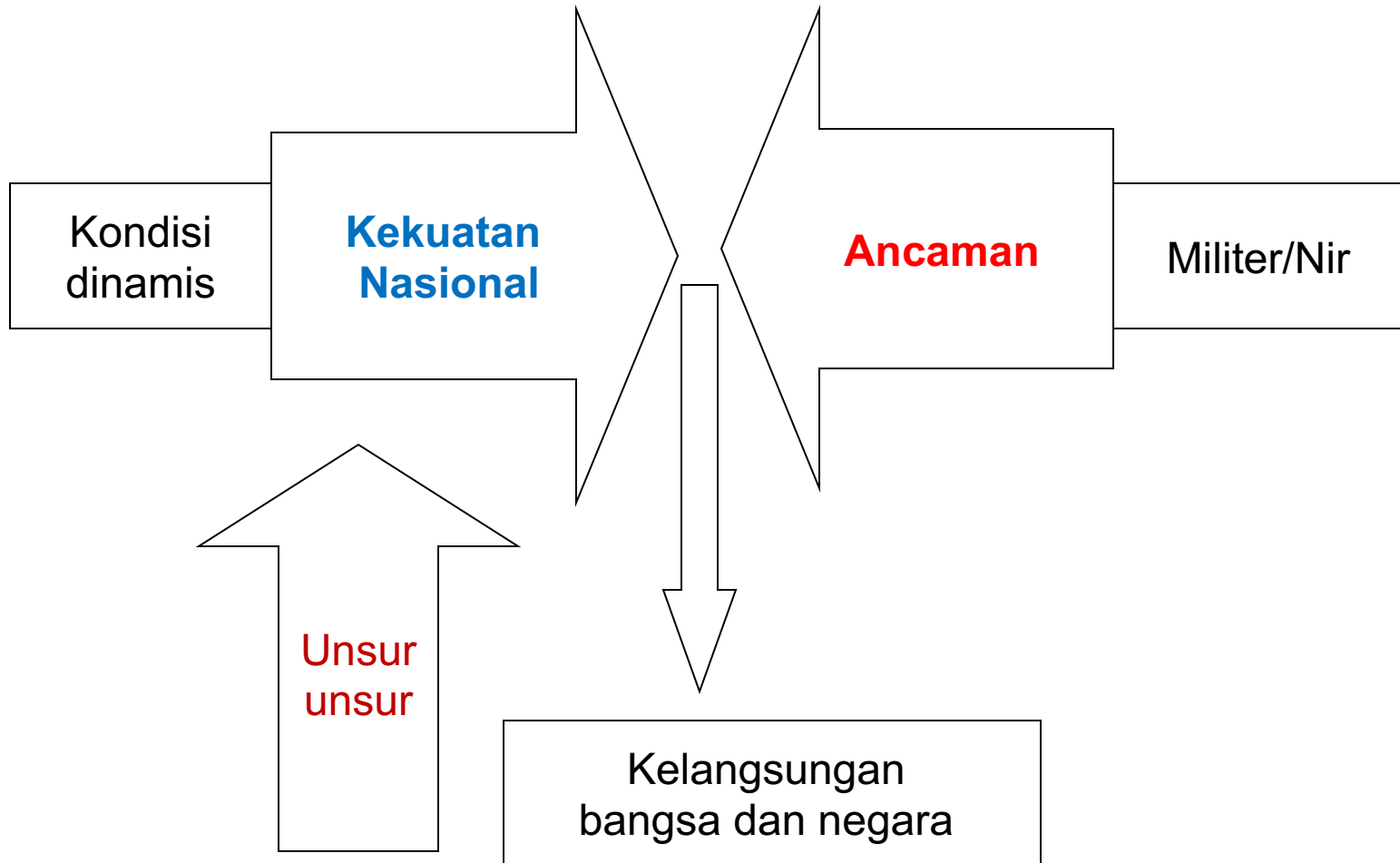
Pengertian Ketahanan Nasional

- Terdapat 3 sudut pandang tentang ketahanan nasional
 - ✓ Ketahanan Nasional sebagai *kondisi*
 - ✓ Ketahanan Nasional sebagai *metode*
 - ✓ Ketahanan Nasional sebagai *doktrin*
- Masing-masing perspektif memiliki makna sendiri-sendiri
- Rumusan ini bersumber dari GBHN

Tannas sebagai kondisi

- Pengertian populer : sebagai *kondisi dinamis* suatu bangsa yang berisi *keuletan dan ketangguhan* yang mengandung kemampuan mengembangkan *kekuatan nasional*, didalam menghadapi dan mengatasi segala *tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan* baik yang datang *luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung* yang membahayakan *identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa & negara serta perjuangan* mengejar tujuan nasional.
- Rumusan GBHN : Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. **Pada hakekatnya** ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara
- Pengertian ini dapat pula diterapkan dalam konsep ketahanan regional, wilayah, masyarakat, keluarga dan ketahanan diri

Skema konsepsional Tannas



Tannas sebagai *metode*

- Tannas sebagai sebuah *pendekatan* , *strategi*, *metode* atau *cara* dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek /sisi baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan.
- Rumusan GBHN : Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka *pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek* kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh
- Ketahanan Nasional merupakan penerapan dari *geostrategi* bangsa Indonesia. Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara dlm menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional

Tannas sebagai Doktrin

- Ketahanan nasional merupakan salah satu *konsepsi khas Indonesia* yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara
- Ketahanan nasional meliputi *ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan*
- Masing-masing bidang tersebut memiliki pengertian sebagaimana dalam GBHN
- Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional menggambarkan *kondisi ideal* dari bidang-bidang pembangunan
- Ketahanan nasional merupakan *landasan konsepsional* Indonesia

Perkembangan Tannas

- Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD
- Adanya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu persatu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia dan Singapura
- Akankah pengaruh (baca; ancaman komunis) itu akan masuk ke Indonesia?
- Untuk itu perlu adanya kekuatan nasional yang antara lain; berupa unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional untuk menghadapi komunisme

Perkembangan Tannas

- Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional).
- Gagasan dan pemikiran perlunya kekuatan nasional guna menghadapi ancaman dilembagakan dalam bentuk ketahanan nasional
- Pada tahun 1969 lahirlah istilah **ketahanan nasional** yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan nasional
- Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi **segala** ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kata **segala** berarti tidak hanya mencakup ancaman komunis, Jadi spektrum ancaman diperluas

Perkembangan Tannas

- Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 menjadi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)
- Selanjutnya Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973 yaitu keketetapan MPR No IV/MPR/1973. Perumusannya sesuai dengan tahun 1972
- Konsep ketahanan nasional berikut perumusan yang sama berlanjut pada GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988
- Pada GBHN 1993 terjadi perubahan perumusan mengenai konsep ketahanan nasional sampai GBHN 1998. Konsepsi ketahanan nasional pada GBHN 1998 adalah rumusan yang terakhir
- Pada GBHN 1999 *-sebagai GBHN terakhir sebab sesudahnya tidak menggunakan GBHN lagi-* **tidak lagi** ditemukan perumusan akan konsepsi ketahanan nasional
- Lalu, bagaimana sekarang ini?

Unsur-unsur Tannas

- Ketahanan nasional sebagai *kondisi* memerlukan *unsur-unsur* yang mempengaruhi sehingga negara memiliki kekuatan nasional
- Unsur/ faktor/ eleman/ gatra apa saja yang dapat mempengaruhi kekuatan nasional sebuah negara?
- Banyak unsur/ faktor/ eleman/ gatra yang mempengaruhi kekuatan negara dalam menjalankan kehidupannya
- Para ahli memberikan pendapat-pendapat yang berbeda
- Unsur kekuatan nasional menurut **Hans J Morgenthau**, terbagi menjadi dua faktor yaitu
 - ✓ faktor tetap (*stable factors*) terdiri atas geografi dan sumber daya alam
 - ✓ faktor berubah (*dinamic factors*) terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional dan kualitas diplomasi

Unsur-unsur Tannas

- Unsur kekuatan nasional menurut **James Lee Ray**, terbagi menjadi dua faktor yaitu ;
 - ✓ *Tangible factors* terdiri atas penduduk, kemampuan industri dan militer
 - ✓ *Intangible factors* terdiri atas karakter nasional, moral nasional dan kualitas kepemimpinan
- Unsur kekuatan nasional menurut **Palmer & Perkins**, terdiri atas ; tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi , moral dan kepemimpinan
- Unsur kekuatan nasional menurut **Parakhas Chandra**, terdiri atas tiga yaitu
 - ✓ Alamiah terdiri atas ; geografi, sumber daya dan penduduk
 - ✓ Sosial terdiri atas ; perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya & moral nasional
 - ✓ Lain-lain ; ide, intelegensi dan diplomasi, kebijaksanaan kepemimpinan

Unsur-unsur Tannas

- Unsur kekuatan nasional menurut **Alfred T Mahan**, terdiri atas ; letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional & sifat pemerintahan
- Unsur kekuatan nasional menurut **Cline**, terdiri atas; sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional dan kemauan nasional
- Unsur kekuatan nasional **model Indonesia** , diistilah dengan *gatra* yang dikembangkan oleh Lemhanas. Dikenal dengan nama Asta Gatra yang terdiri atas Tri Gatra dan Panca Gatra.
 - ✓ Tri gatra adalah aspek alamiah (*tangible*) yang terdiri atas ; penduduk, sumber daya alam dan wilayah
 - ✓ Panca gatra adalah aspek sosial (*intangible*) yang terdiri atas; ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

Unsur-unsur Tannas

- Unsur-unsur Tannas tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut
- *Penduduk* yang bagaimana yang bisa berpengaruh positif bagi kekuatan sebuah negara?
- *Wilayah* yang bagaimana yang mampu memberikan kontribusi bagi kekuatan nasional suatu negara?
- *Sumber daya alam* yang bagaimana yang mempengaruhi kekuatan nasional negara? Dan seterusnya
- Jawaban eksploratif atas pertanyaan di atas sampai pada kesimpulan bahwa pada hekekatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan.
- Dalam prakteknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional

Mengukur ketahanan penduduk ?

Usia harapan hidup

Jumlah penyakit yang diderita

Jumlah angka kematian bayi dan ibunya

Jumlah perkawinan dibawah umur

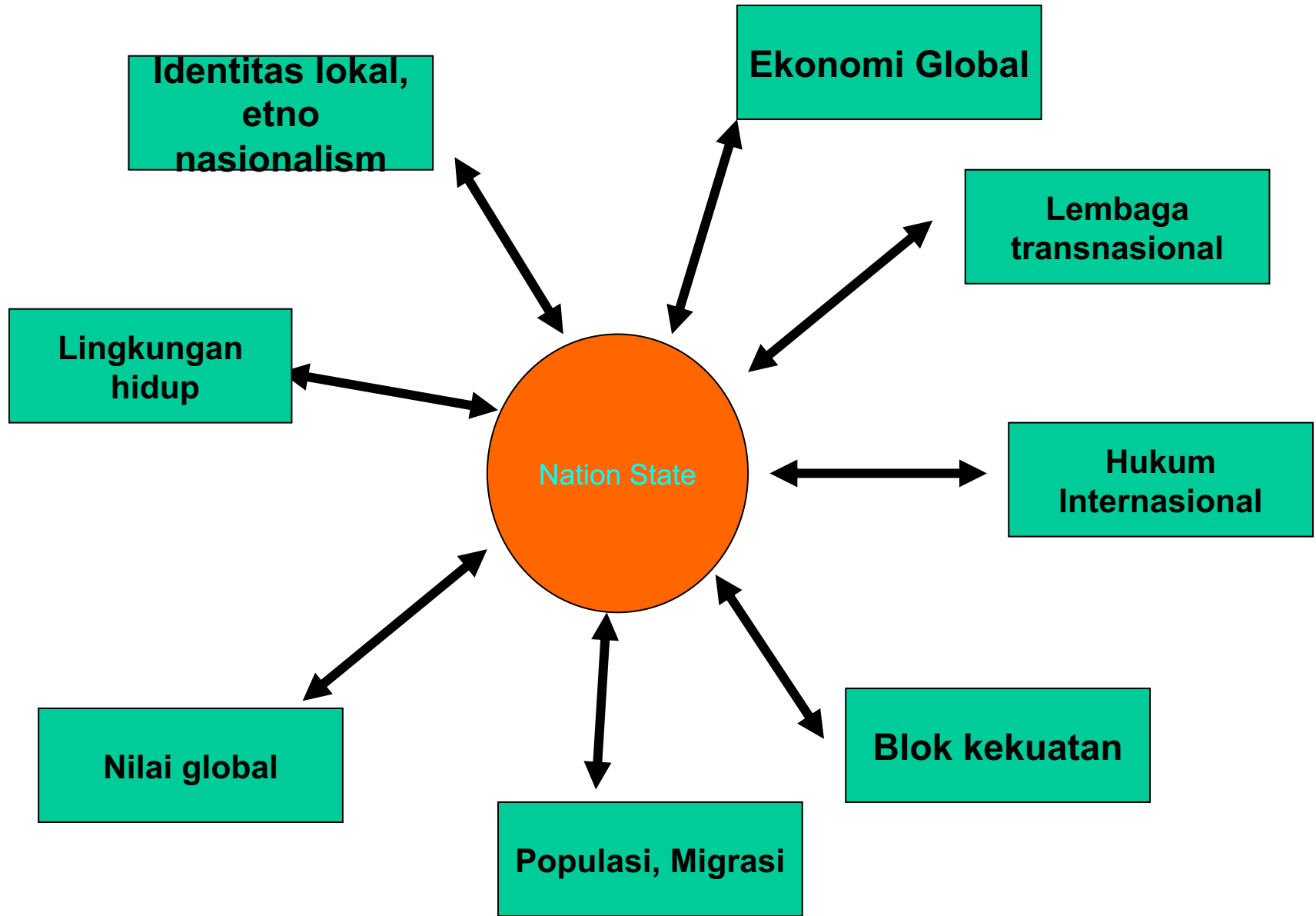
Penghasilan bulanan
Jumlah pengangguran
Jumlah usia produktif

Tingkat pendidikan
Macam ketrampilan

Tannas di era global

- Spektrum ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas tidak sekedar fisik dan politis
- Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap terhadap kehidupan suatu bangsa
- Globalisasi memberikan *peluang* yang akan berdampak *positif* bagi kemajuan suatu bangsa, namun di sisi lain menimbulkan *ancaman* yang ditengarai bisa berdampak *negatif* bagi bangsa dan negara.
- Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan harus mampu menghadapi *ancaman global* yang dapat membahayakan kelangungan hidup bangsa dan negara

Posisi negara di era global



Kategori Ancaman

- Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
- Spektrum ancaman bisa dikategorikan dalam dua jenis; *ancaman militer* dan *ancaman non militer/ nir militer*
- Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa
- Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup; agresi, spionase, pelanggaran wilayah , sabotase , aksi teror bersenjata , pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, perang saudara
- Ancaman nirmiliter seperti konflik komunal , kejahatan lintas negara , merusak lingkungan , bencana alam , penyakit

Apa yang harus dilakukan warga?

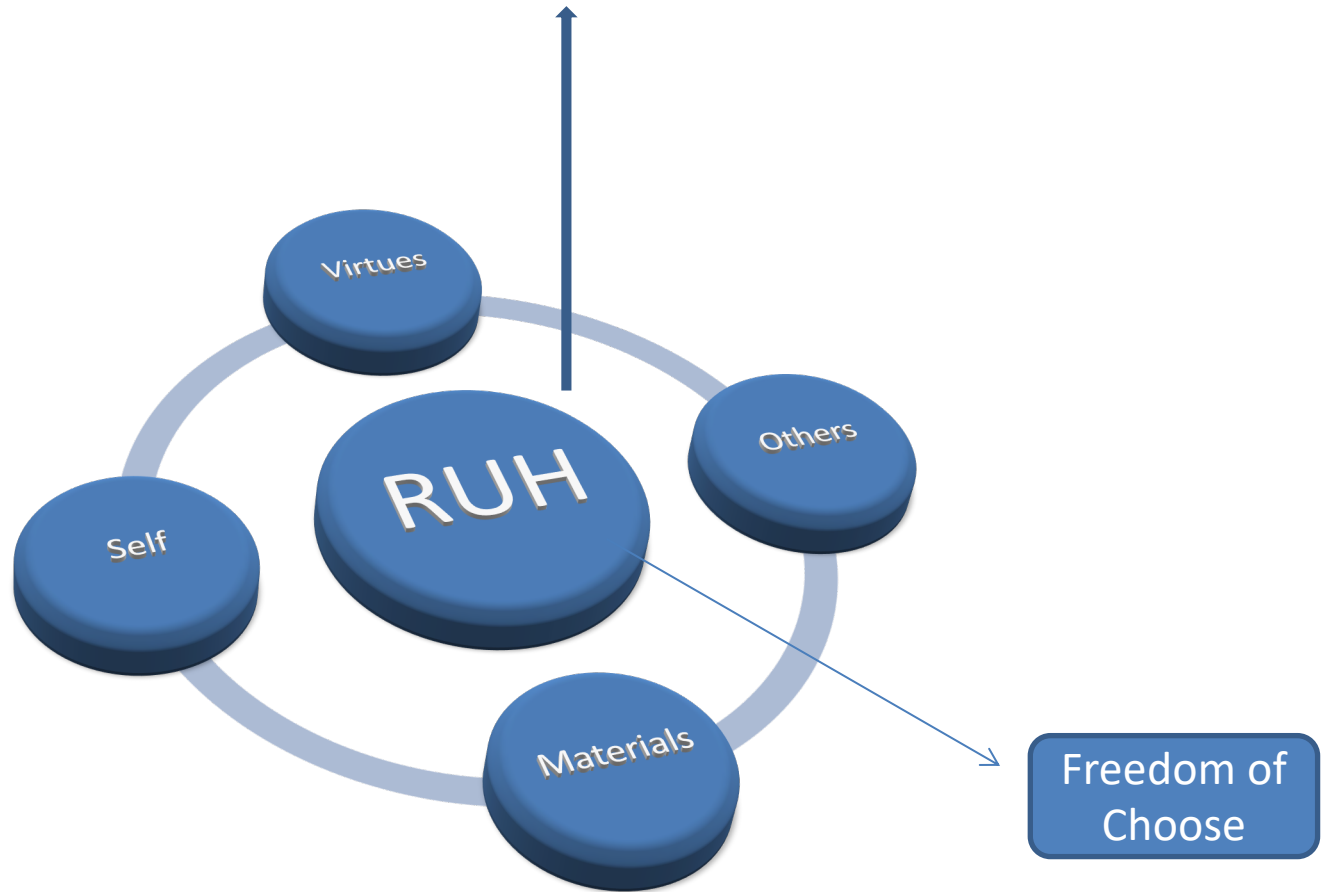
- Melakukan upaya bela negara
- Bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
- Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik.
- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, dapat diselenggarakan melalui:
 - ✓ pendidikan kewarganegaraan;
 - ✓ pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - ✓ pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - ✓ pengabdian sesuai dengan profesi.

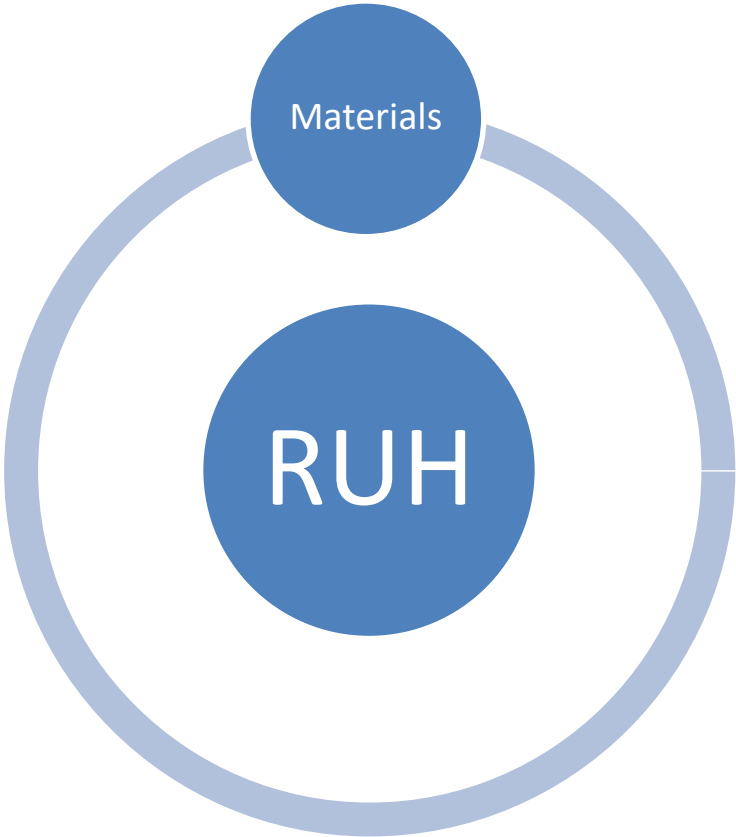
ANCHOR THEORY

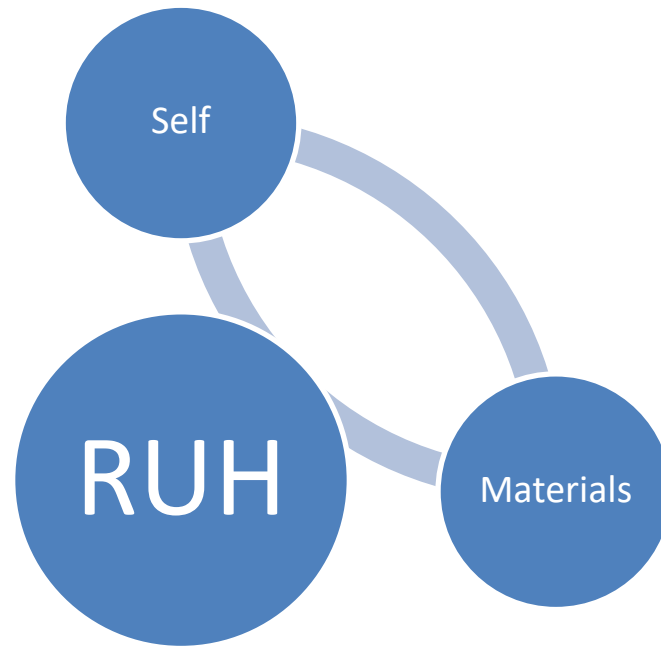
Raharjo, S.Pd., M.Sc.

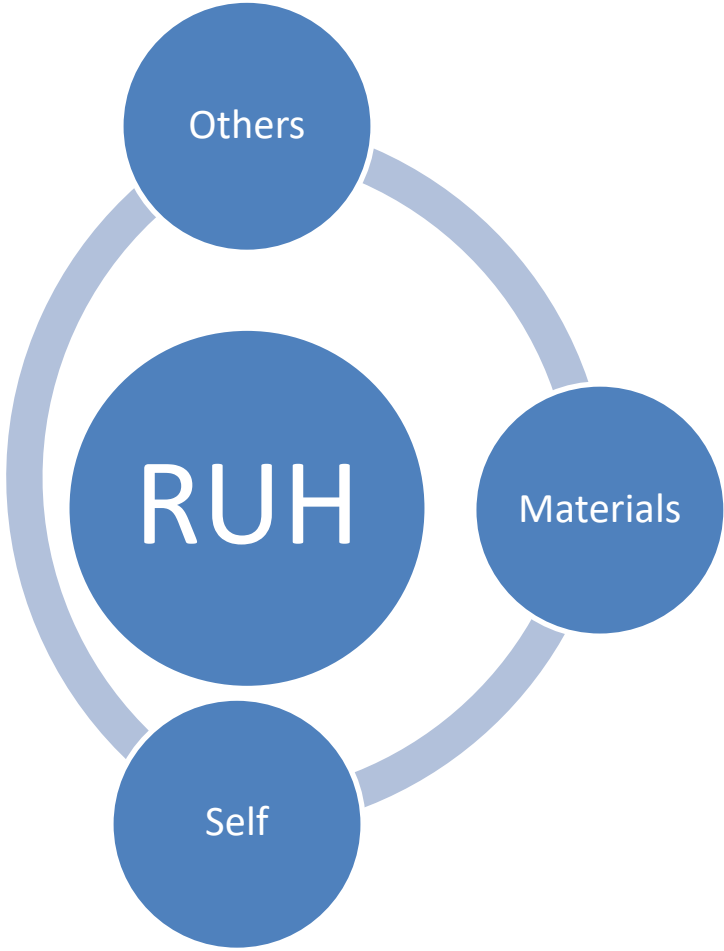
Anchor is something that functions as **purpose, reason, motive** and simultaneously **something to depend on**

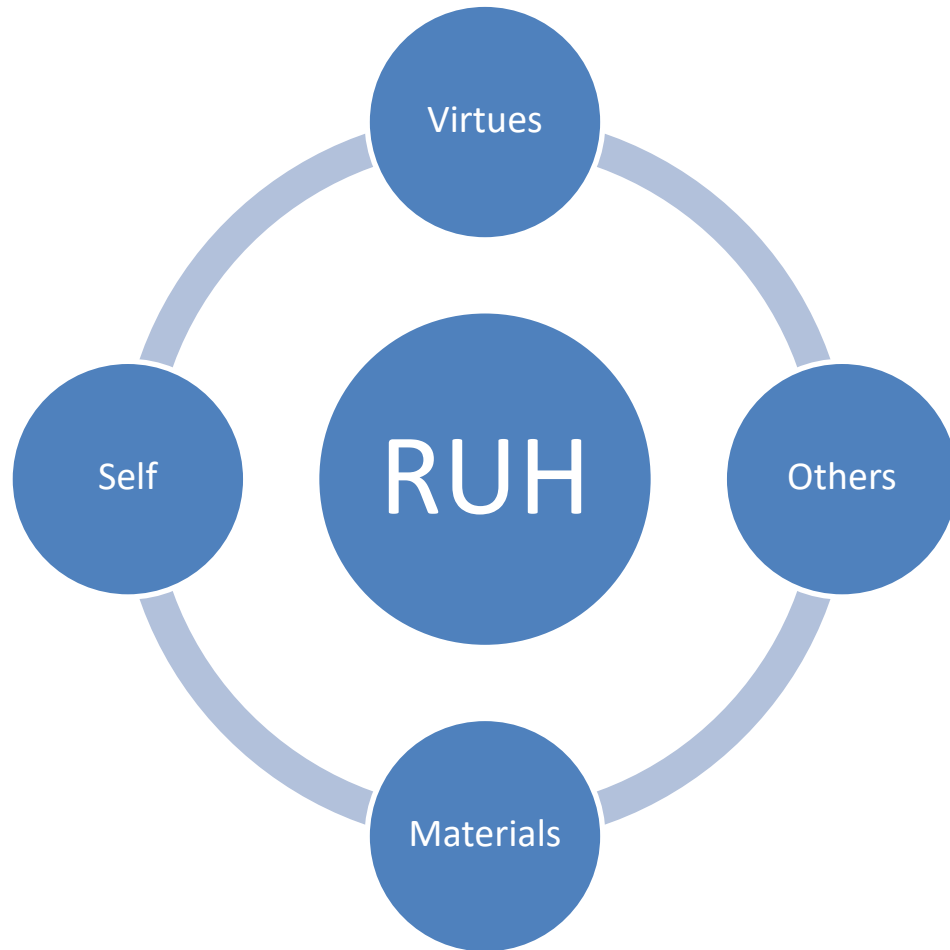
Anchor

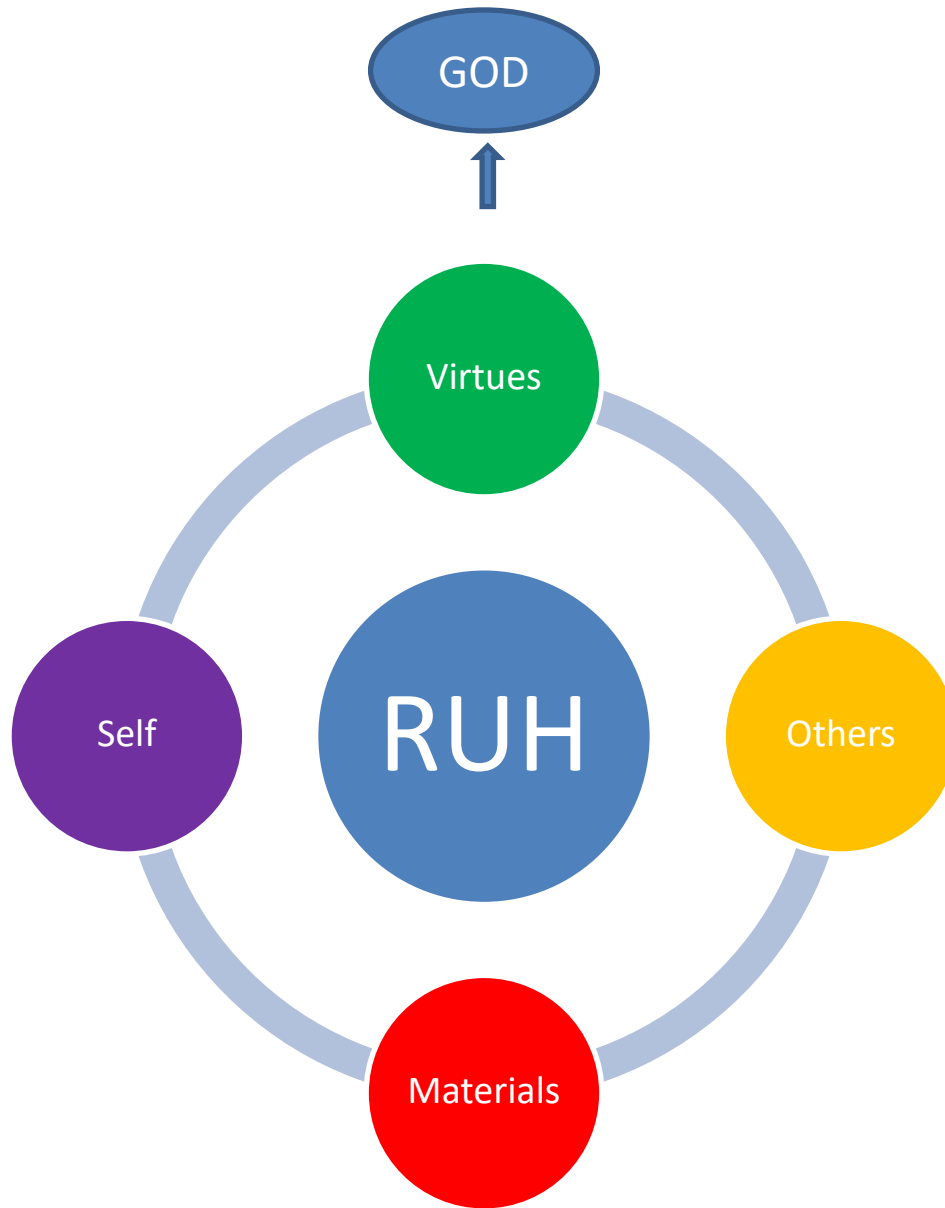


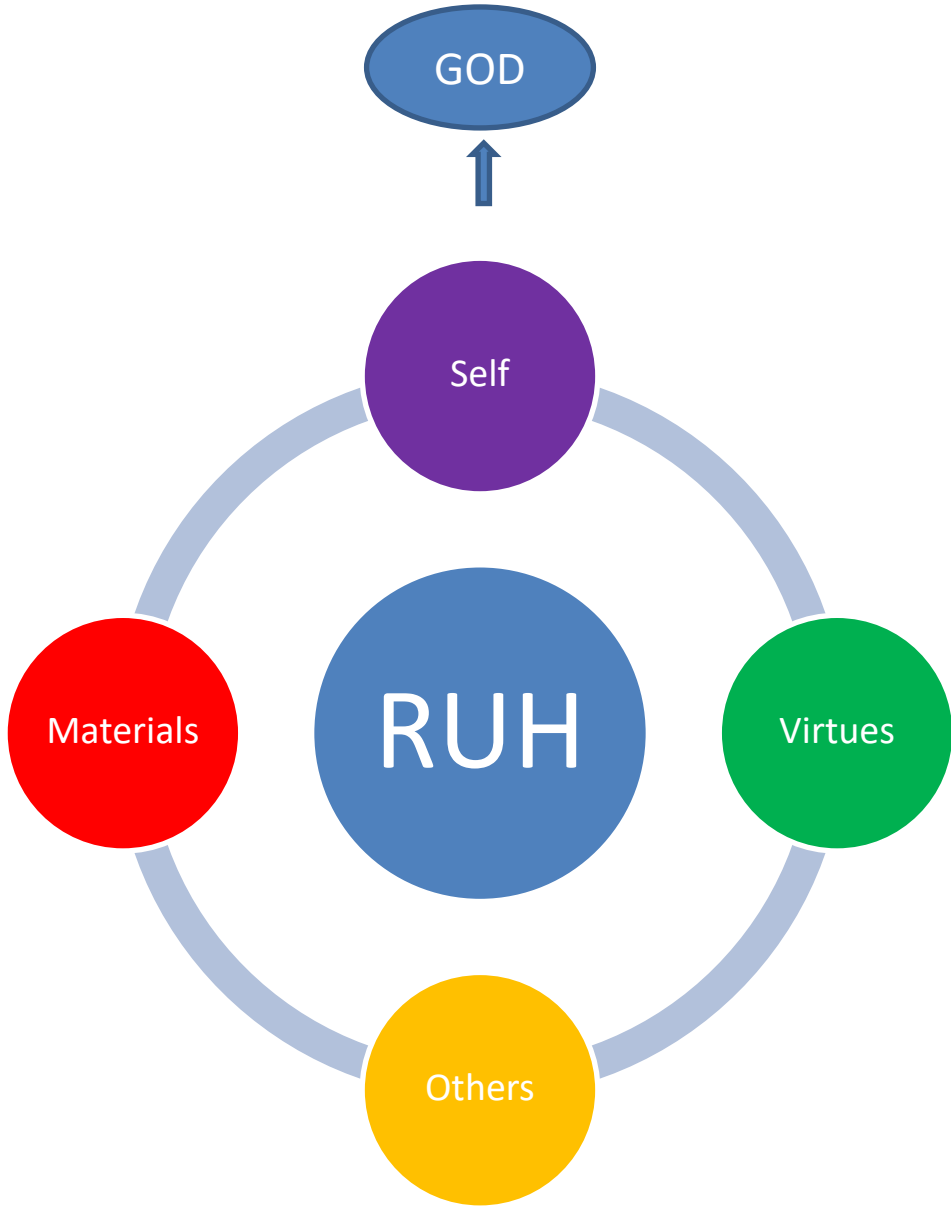


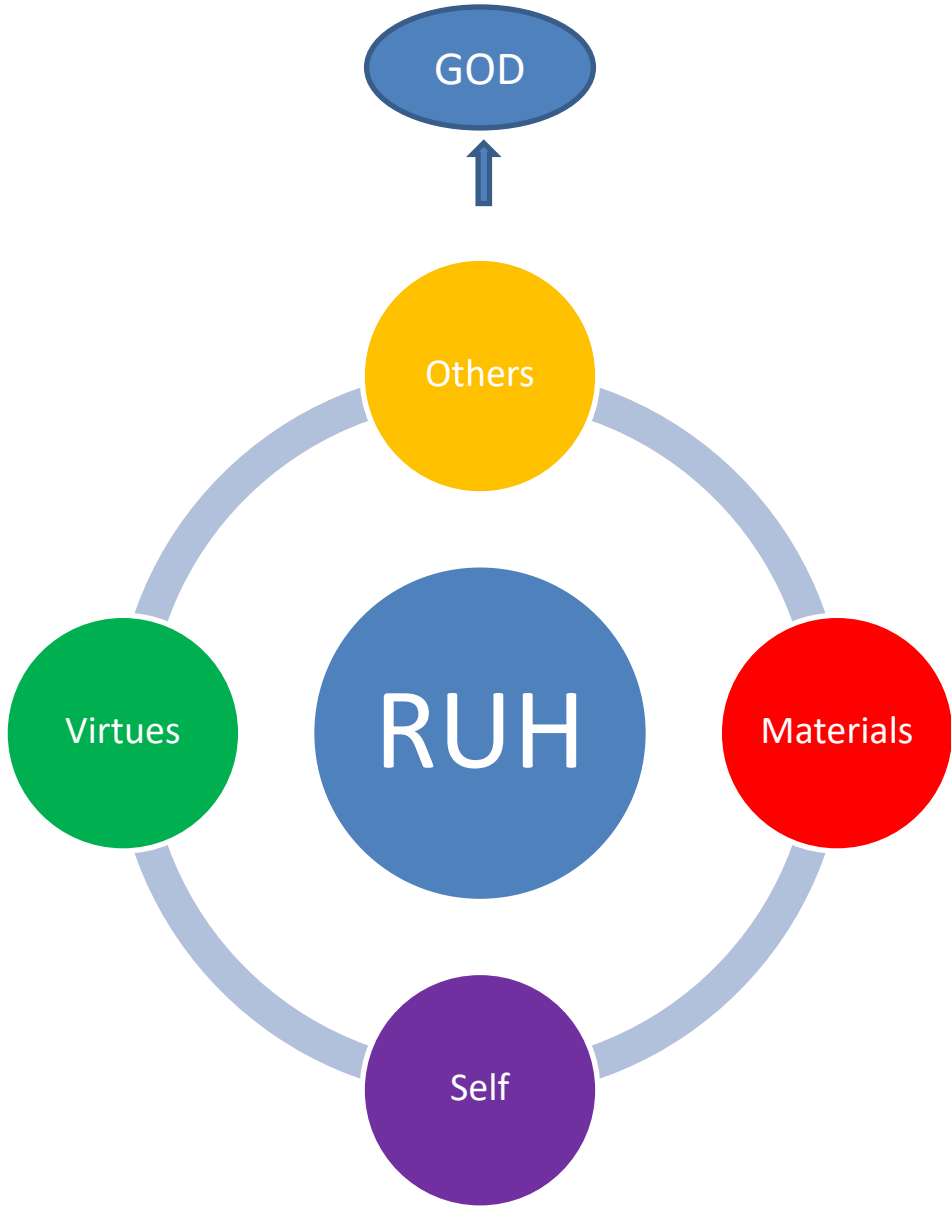


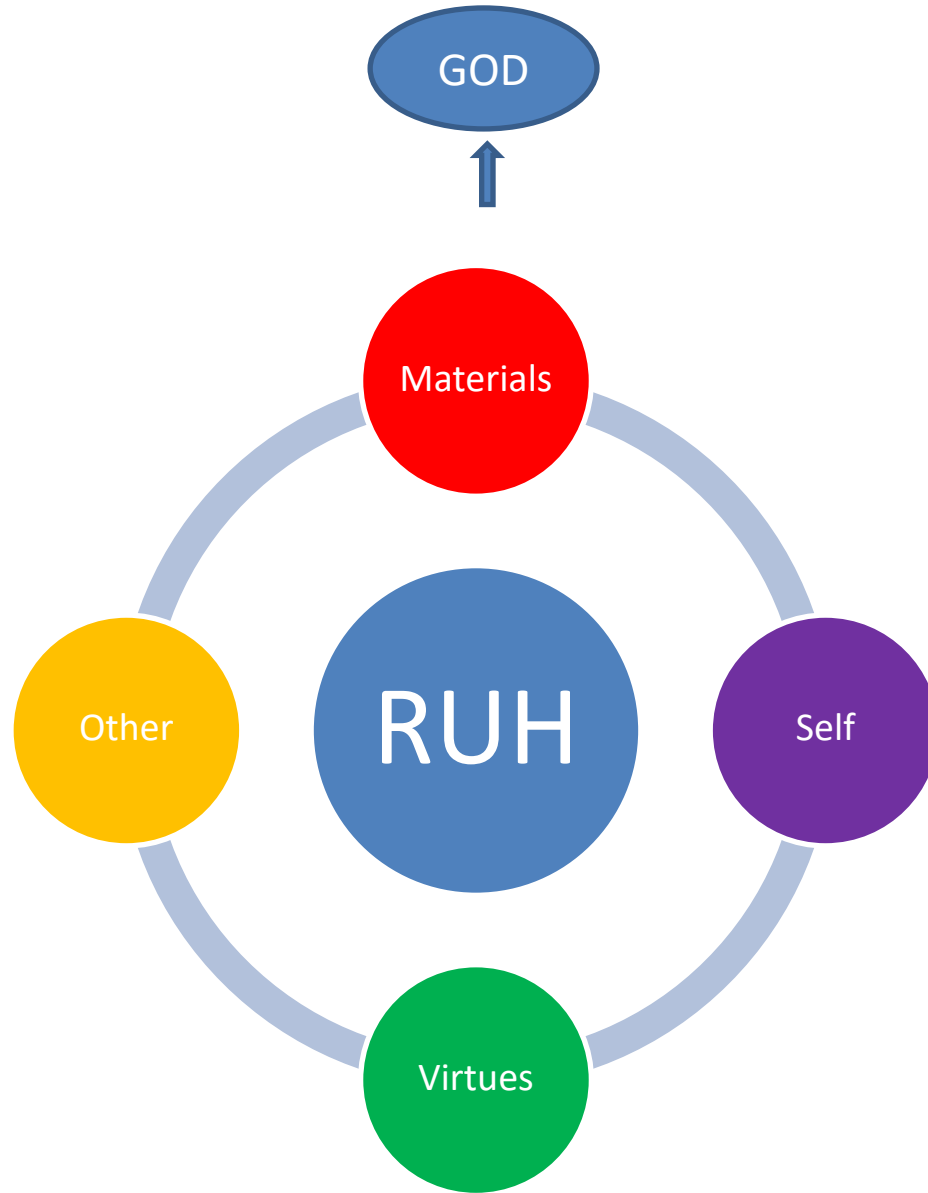


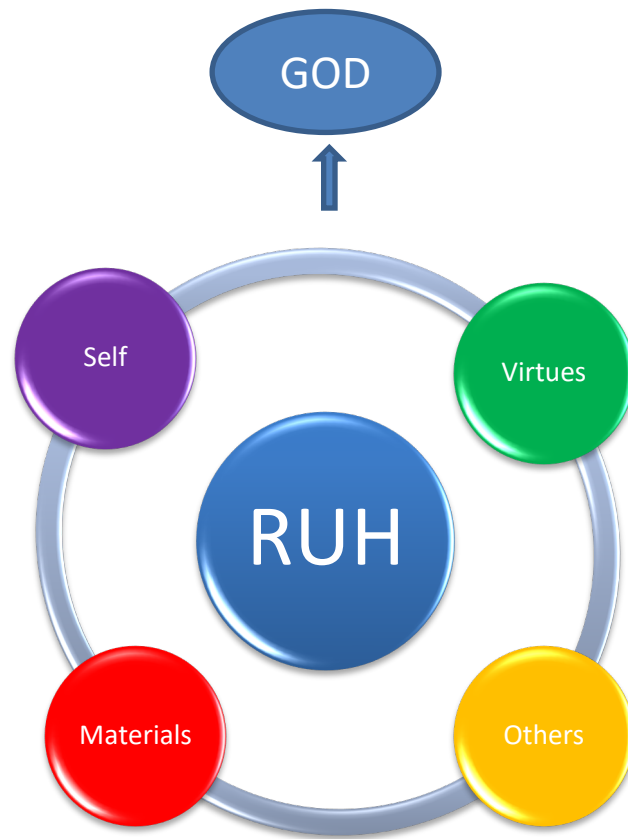


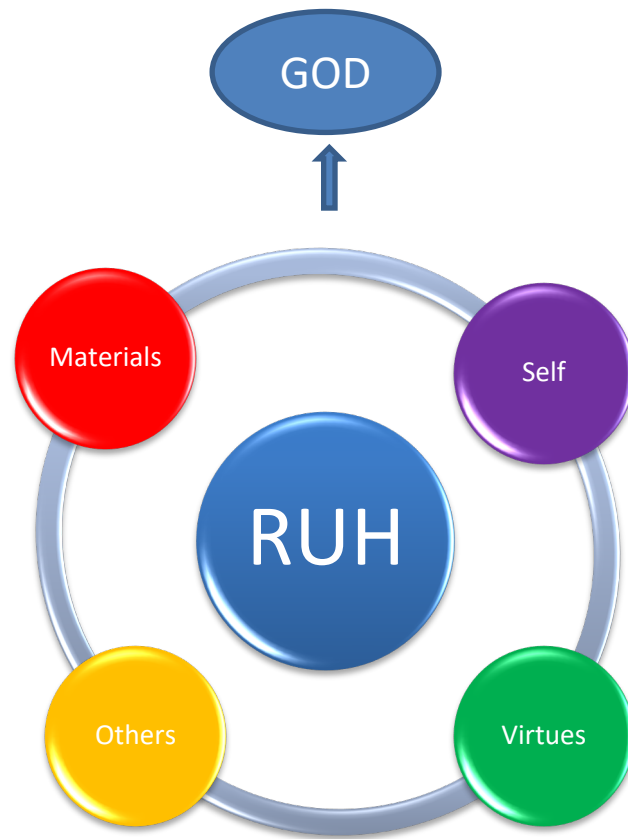


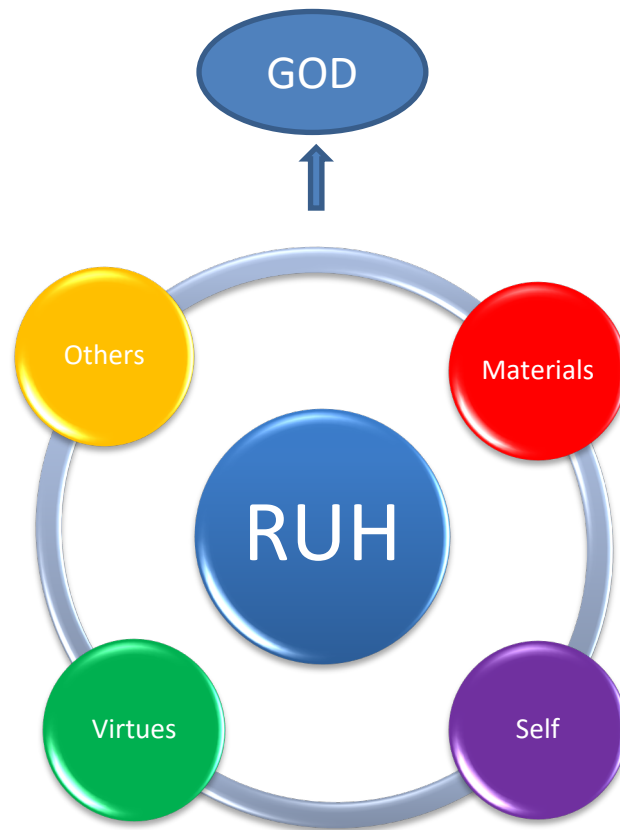


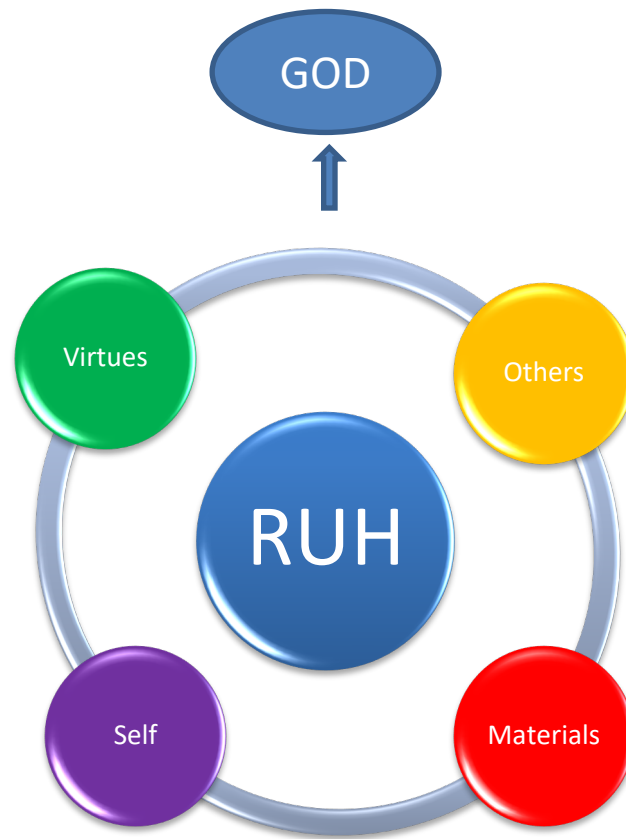


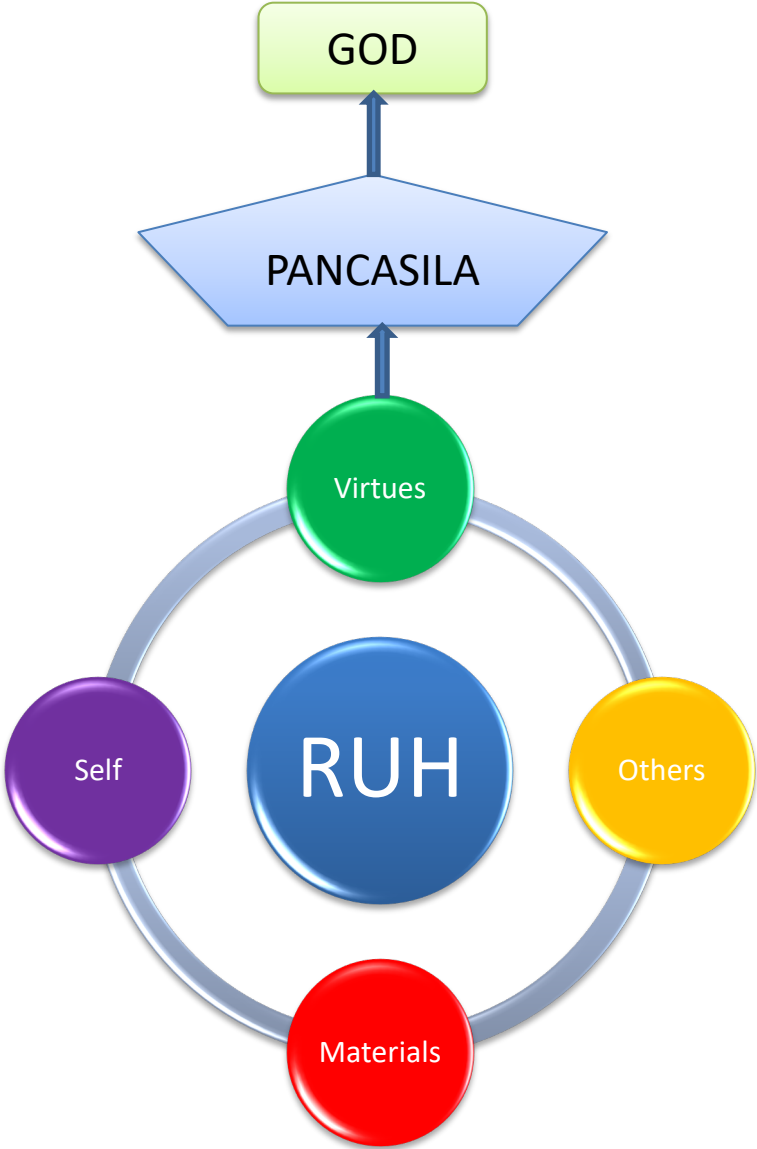












Anchor is based on Pancasila

- Believe in GOD
- Humanism
- nasionalisme
- Democracy
- Social Justice

